

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan negara adalah cita-cita terhormat dari arsitek awal kami. Otonomi bukan hanya berarti bebas dari penyusup, lebih dari itu adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Sekarang ini kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menerus menjadi permasalahan di dunia khususnya di Indonesia. Kebutuhan adalah kekhawatiran pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian terdekat. Salah satu unsur yang menyebabkan keterbelakangan dan penghambat kemajuan suatu negara adalah tingginya laju kebutuhan. Kebutuhan dapat memiliki dampak pengganda pada permintaan sosial secara umum dan kemiskinan adalah muara dari masalah sosial lainnya.

kemiskinan adalah masalah bagi setiap negara. Terutama untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di Indonesia, kemiskinan adalah masalah yang sangat penting, karena kecenderungannya yang berkembang, serta hasil-hasilnya yang mencakup perluasan moneter serta masalah persahabatan dan ketidakamanan politik dalam negeri. Kemiskinan sendiri saat ini menimbulkan berbagai penyakit sosial seperti banyaknya pengangguran, kejahatan, pelacuran dan kriminalitas (Burlian 2016:14).

Dengan cara ini, pengentasan kemiskinan harus menjadi perhatian pertama dalam perputaran keuangan, baik dalam jangka pendek maupun

jangka panjang. Masalah kemiskinan menurut Astuti (dalam Sari dan Abdullah 2017:36) sebagai berikut:

Masalah kemiskinan merupakan salah satu perosalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah karena terbilang cukup sulit untuk mengatasinya. Terkadang ada kalanya suatu kemiskinan harus benar-benar terjadi karena adanya suatu kondisi yang memaksa seseorang untuk miskin misalnya krisis ekonomi, juga gaya hidup dan budaya yang justru mengakibatkan masyarakat Indonesia itu menjadi miskin. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan.

Laju penurunan kemiskinan di Kabupaten Malang masih terbilang lambat, dan cenderung tidak teratur selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 mencatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang sebagai berikut :

Tabel 1: Data Kemiskinan Kabupaten Malang Tiga Tahun Terakhir

2018	2019	2020
10.35%	9.46%	10.13%
268,490 ribu	246,600 ribu	265,560 ribu

Sumber: BPS, Jumlah Penduduk Miskin 2020

Akibat adanya pandemi covid-19 di Indonesia, juga berdampak pada Desa Sukorejo Kecamatan Tirtoyudo, namun saat ini kondisi desa sukorejo cukup baik, jika dilihat dari prepestif pembangunan desa, namun dalam segi kemiskinan di desa sukorejo meningkat. Sebagaimana di kemukakan oleh bapak Haris yang bertugas di bagaian kependudukan pada tanggal 12 oktober 2021.

“Berdasarkan data dari Kementrian Sosial pada tahun 2020 terdapat 2.46% jumlah penduduk miskin desa sukorejo dari 4.740 jiwa, lebih

tepatnya terdapat 117 masyarakat miskin dan pada tahun 2021 angka kemiskinan di desa sukorejo meningkat menjadi 5,75% lebih tepatnya 273 jiwa miskin hal tersebut yang harus menjadi pertimbangan dan perhatian pemerintah daerah, jika dilihat dari segi kependudukan jumlah penduduk pada tahun 2021 berjumlah sebanyak 4.744 jiwa dengan 12 RT DAN 3 RW”.

Berdasarkan UU nomer 6 tahun 2014 dana desa sebagai salah satu dari pendapatan desa, maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBN). Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran lain yang mencakup jangka waktu satu tahun, Mulyadi (dalam Bawono, dan Setyadi 2019:41).

Berdasarkan Survei pendahuluan yang saya lakukan pada tahun ini berkaitan dengan dana desa tahun 2020, sebagaimana yang di kemukakan oleh bapak Danny Tri Mawardi yang bertugas di bagian sekretaris desa pada tanggal 12 oktober 2021.

“Menyatakan anggaran dana desa sendiri tahun 2020 sebesar Rp. 932.060.000 dan untuk keseluruhanya sebesar Rp. 1.622.974,550. Anggaran dana ini di peruntukkan dalam 5 bidang, bidang pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan kemasyarakatan, dan bidang penanggulangan bencana (bila keadaan daurat dan mendesak)”.

Mengenai anggaran dana desa juga ada permasalahanya yang di alami dalam penanganan dana desa. Sebagaimana di kemukakan oleh bapak Danny Tri Mawardi yang bertugas di bagian sekretaris desa pada tanggal 12 oktober 2021 sebagi berikut

“Mengenai dengan permasalahan mengenai dana desa yang meliputi dalam penyelenggaraan anggaran pendapatan belanjaja desa (APBDes) sering ada peraturan baru dari pemerintah, baik naisonan,

maupun kabupaten seringkali adanya perubahan di karenakan pandemi covid-19. Semula dalam keadaan normal perubahan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) dalam satu tahun hanya satu kali, dan pada tahun 2020 sempat melakukan dua kali perubahan peraturan kepala desa dan melakukan perubahan untuk menyesuaikan yang di tetapkan oleh kabupaten”.

Sedangkan menurut Bapak Badri masyarakat dari desa sukorejo RT 02 RW 01 pada tanggal 17 oktober 2021 mengemukakan bahwa :

“Masih banyak sarana yang belum memadai contohnya lampu jalan, padahal jalan tersebut menjadi jalan faktor utama yang sering di lalui oleh masyarakat dan yang kedua untuk tempat pembuangan sampah belum ada, sehingga masyarakat membuang sampah ke curang padahal bisa mencemari lingkungan. Oleh karena itu bagaimana upaya desa dalam menanggulangi masalah tersebut dengan dana desa”.

Dengan demikian hal ini harus menjadi pertimbangan pemerintah desa sebagai strategi desa dengan tujuan akhir untuk melibatkan daerah setempat dan mengurangi kemiskinan. Pemerintah desa harus dilakukan secara terkoordinasi menuju terwujudnya masyarakat sejahtera yang memungkinkan daerah setempat memiliki pilihan untuk menikmati kehidupan yang unggul. Juga pemerintah desa harus terbuka untuk dikembangkan dengan tujuan yang dapat mempengaruhi pemerintah desa yang baik. Dari penjelasan di atas penulis sangat tertarik untuk membedah hal ini dengan mengangkat sebuah judul “IMPLEMENTASI PROGRAM DANA DESA” di Desa Sukorejo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang penelitian yang telah di uraikan diatas, maka masalah penlitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Dana Desa (DD) di Desa Sukorejo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang ?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Dana Desa (DD) di Desa Sukorejo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan Implementasi Program Dana Desa (DD) di Desa Sukorejo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Dana Desa (DD) di Desa Sukorejo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki berbagai macam manfaat. Adapun manfaat – manfaat itu dapat dibagi ke dalam 2 kategori, yakni manfaat teoritis dan praktis.

1. Dari segi teoritis :
 - a. Secara teoritis penelitian dapat mengambil pengalaman dari penyusunan skripsi yang berhubungan mengenai Implementasi Program Dana Desa Di Desa Sukorejo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

b. Dalam penelitian ini dapat diketahui mengenai Implementasi Program Dana Desa Di Desa Sukorejo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

2. Dari segi praktis :

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang Implementasi Program Dana Desa Di Desa Sukorejo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang.

b. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan peneliti dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk penambahan informasi terkait dengan Implementasi Program Dana Desa.